



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

**NATIONAL
FOOD
AGENCY**

2025 LAPORAN MARET

**DEPUTI BIDANG
KERAWANAN PANGAN
DAN GIZI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt. atas berkat rahmat dan hidayah- Nya sehingga penyusunan Laporan Bulanan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bulan Maret Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan bulanan disusun untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, Laporan Bulanan merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.

Laporan Bulanan ini berisi tentang laporan realisasi pencapaian output fisik dan realisasi penyerapan anggaran setiap akhir bulan berjalan dan disusun sebagai laporan kinerja lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi referensi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan berikutnya.

Jakarta, April 2025
Plt. Deputi Bidang Kerawanan
Pangan dan Gizi,

Dr. Drs. Sarwo Edhy, S.P., M.M., M.H.✱
NIP. 196203221983031001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTARGAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Metodologi Penyusunan Laporan	2
BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT	3
2.1. Rencana Kinerja	3
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	5
3.1. Realisasi Fisik dan Keuangan	5
BAB IV PENUTUP.....	20
4.1. Kesimpulan	20
4.2. Permasalahan	20
4.3. Langkah Perbaikan (Rekomendasi).....	20



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Fisik dan Keuangan Bulan Maret sesuai DIPA Revisi Badan Pangan Nasional (sesuaikan target dan pagu anggaran dengan file laporan realisasi Maret).....	3
Tabel 2. Realiasi Fisik dan Keuangan Bulan Maret 2025 Per Output dan Komponen Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi (sesuaikan target dan pagu anggaran dengan file laporan realisasi maret)	5



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dengan pembahasan tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	9
Gambar 2. Koordinasi dengan JICA terkait penjajakan peluang kolaborasi kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan	12
Gambar 3. Berbagi Praktik Baik dengan Vietnam via zoom, tentang NFA Sebarkan Aksi Penyelamatan Pangan di Indonesia	15
Gambar 4. Badan Pangan Nasional mewakili Pemerintah RI dalam Praktik Baik Pengelolaan Sampah di Jepang, sekaligus memperkuat upaya penanganan susut dan sisa pangan.	17
Gambar 5. Pastikan Ketersediaan Pangan Aman Jelang Idulfitri, NFA Imbau Masyarakat Belanja Bijak Sesuai Kebutuhan	19



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49), Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Direktorat Kewaspadaan Pangan menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi; b. Pengendalian Kerawanan Pangan c. Pengadaan dan Pengelolaan dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana d. Pengawasan dan pemenuhan persyaratan gizi pangan; e. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerawanan pangan dan gizi e. Pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang kerawanan pangan dan gizi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala. Selain itu, pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Hasil dari pemantauan dan evaluasi serta bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran selama bulan Maret Tahun 2025 dituangkan dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan di Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi posisi bulan Maret tahun 2025. Laporan ini merupakan catatan rekaman realisasi fisik dan keuangan selama bulan Maret Tahun 2025 serta hasil evaluasi menuju perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan. Ruang lingkup laporan ini mencakup keseluruhan output lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi baik fisik



maupun keuangan. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberi informasi tentang hasil pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan dan Direktorat Kewaspadaan Pangan di tahun berjalan. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada periode pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.2. Tujuan

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui realisasi fisik dan keuangan lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada bulan Maret 2025.
2. Melakukan pemantauan terhadap realisasi fisik dan keuangan, berdasarkan target pada bulan Maret 2025

1.3. Metodologi Penyusunan Laporan

1. Mengumpulkan data dan informasi target dan capaian fisik dan keuangan.
2. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.
3. Menyajikan hasil analisis dalam laporan.



BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT

2.1. Rencana Kinerja

Rencana kinerja output merupakan pencapaian dari sasaran strategis dan indikator kinerja Badan Pangan Nasional selama tahun 2025. Rencana kinerja output pada bulan Maret tahun 2025 akan dilihat dari dukungan pencapaian output/RO dan komponen sebagaimana target sesuai lembar III DIPA Revisi pada bulan Maret tahun 2025. Pada dokumen tersebut pada bulan Maret ditargetkan sebesar 3,75%. Target tersebut sebagaimana tersaji pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Target Fisik dan Keuangan Bulan Maret sesuai DIPA Revisi Badan Pangan Nasional (sesuaikan target dan pagu anggaran dengan file laporan realisasi Maret)

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			Alokasi Tahun 2025		Target Bulan Maret Tahun 2025	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Anggaran Rp.14.536.538.000	Fisik	Keuangan (3,75%) Rp.545.120.175	Fisik
HA-Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas						
6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemanapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi						
AEA - Koordinasi	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	1,114,864,000	1 kegiatan	41,807,400	0
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	179,647,000	4 NSPK	6,736,763	0
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	476,337,000	1 rekomendasi kebijakan	17,862,638	0
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	Penyaluran Bantuan Pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	4,655,627,000	64.800 paket	174,586,013	0



Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			Alokasi Tahun 2025		Target Bulan Maret Tahun 2025	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Anggaran Rp.14.536.538.000	Fisik	Keuangan (3,75%) Rp.545.120.175	Fisik
QEC-Bantuan Pangan Produk	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	Penyaluran Bantuan Pangan terfortifikasi	583,200,000	1.944 paket	21,870,000	0
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	402,770,000	1 Data	15,103,875	0
AEA-Koordinasi	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	1,559,056,000	1 Kegiatan	58,464,600	0
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	914,282,000	5 rekomendasi kebijakan	34,285,575	1
QMA – Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Penyelamatan pangan	Data dan Informasi Penyelamatan pangan	1,004,850,000	1 Data	37,681,875	0
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	257,900,000	1 Data	9,671,250	0
RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	Fasilitasi sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	3,388,005,000	0	127,050,188	0



BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Realisasi Fisik dan Keuangan

Sesuai dengan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025, Anggaran Deputi Bidang Kerawanan Pangan terdapat di masing-masing eselon 2 yaitu Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan akan melaksanakan 5 (lima) KRO yang terdiri dari 6 output/RO dengan pagu anggaran sebesar Rp 7.412.445.000,- dan Direktorat Kewaspadaan Pangan memiliki 5 output/RO dengan pagu anggaran pusat sebesar Rp. 7,124,093,000.- dan untuk mendukung capaian kinerja kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Realisasi keuangan pada bulan Maret Tahun 2025 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi fisik dan keuangan per output.

Tabel 2. Realiasi Fisik dan Keuangan Bulan Maret 2025 Per Output dan Komponen Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi (sesuaikan target dan pagu anggaran dengan file laporan realisasi maret)

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			TARGET (3,75%)		REALISASI	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Keuangan Rp.545.120.175	Fisik	Keuangan Rp. 217.186.040	Fisik
6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi						
AEA - Koordinasi	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	41.807.400	1 kegiatan	58.335.660	0
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	6.736.763	4 NSPK	0	0
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	17.862.638	1 rekomendasi kebijakan	1.925.500	0
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	Penyaluran Bantuan Pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	174.586.013	64.800 paket	210.000	0



Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			TARGET (3,75%)		REALISASI	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Keuangan Rp.545.120.175	Fisik	Keuangan Rp. 217.186.040	Fisik
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	Penyaluran Bantuan Pangan terfortifikasi	15.103.875	1.944 paket	210.000	0
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	402.770.000	1 Data	2,971,200	0
AEA-Koordinasi	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	1.559.056.000	0	64.897.370	0
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	914.282.000	1	56.421.030	0
QMA – Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Penyelamatan pangan	Data dan Informasi Penyelamatan pangan	1.004.850.000	0	32.215.280	0
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	257.900.000	0	0	0
RAG- Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	Fasilitasi sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	3.388.005.000	0	0	0

Berdasarkan realisasi fisik dan keuangan Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi periode Maret Tahun 2025, yang terserap sebesar Rp 217,186,040,- atau 1,49% dari total alokasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 14,536,538,000,-. Apabila dibandingkan dengan target periode bulan Maret Tahun 2025 sebesar Rp.545.120.175. maka persentase capaian realisasi terhadap target tersebut adalah **39.84%**. Realisasi ini didukung oleh kegiatan dari dua direktorat, yaitu: 1). Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan sebesar Rp.163.687.407 2). Direktorat Kewaspadaan Pangan sebesar Rp.102.299.668. Selama periode



tersebut, kegiatan yang telah dilaksanakan mencakup koordinasi program, pengumpulan data lapangan, penyusunan laporan pemantauan, serta kegiatan pendukung lainnya yang sesuai dengan rencana kerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.

3.1.1. Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan

Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan melaksanakan 6 output yaitu: 1) Koordinasi Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan; 2) NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan; 3) Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan; 4) Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan(Bantuan Pangan untuk Masyarakat Terdampak Bencana dan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan) ; 5) Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi 6) Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan. dengan alokasi anggaran pusat sebesar Rp. 7.412.445.000 (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan bulan Maret 2025:

1. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dengan pembahasan tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Rapat Koordinasi dilaksanakan pada hari Jumat 14 Maret 2025 yang dilaksanakan di Ballroom BPJS Ketenagakerjaan, bertujuan untuk melakukan koordinasi terkait Inpres penanggulangan kemiskinan ekstrem nasional serta pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pertemuan dibuka dan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan dihadiri oleh Mentri dan Kepala Lembaga atau perwakilan dari 43 K/L.

Menko PM menjelaskan langkah awal untuk melakukan sinergi dan kolaborasi lintas K/L dalam penanganan kemiskinan ekstrem karena diperlukan kehadiran dan keseriusan agar tercapai target pembangunan yang menjadi tanggung jawab masing-masing K/L.



Persentase penduduk miskin per September 2024 sebanyak 24,06 juta orang (8,57%) di mana 1,13% nya adalah penduduk miskin ekstrem. Provinsi dengan kemiskinan ekstrem terbesar adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur.

Sinergi program intervensi lintas K/L agar dilakukan melalui pelaksanaan yang terukur, terpadu, dan berkelanjutan untuk mempercepat mobilitas sosial, sehingga target graduasi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dapat tercapai, yaitu kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2026 dan kemiskinan relative menjadi 4,5% pada tahun 2029.

K/L yang memiliki program dan perlu disinergikan seperti pemberdayaan usaha, program padat karya, dan hilirisasi pertanian dapat menggunakan provinsi dengan kemiskinan ekstrem tinggi sebagai prioritas lokasi, sehingga bantuan dan pemberdayaan di lokasi tersebut dapat menurunkan kemiskinan ekstrem secara signifikan.

Data penerima sasaran akan menggunakan DTSEN, sehingga akan fokus pada ketepatan sasaran yang tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan sosial tetapi juga pemberdayaan masyarakat.

Menteri Sosial menyampaikan bahwa DTSEN akan menjadi data tunggal yang digunakan dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan; yang dimutakhirkan setiap tiga bulan sekali untuk diolah oleh BPS.

Menteri Keuangan menyampaikan diperlukan review kebijakan lama untuk belajar dari pengalaman dan memperbaiki kesalahan kebijakan, seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. K/L perlu menjelaskan peran masing-masing dalam pengentasan kemiskinan, sehingga tidak ada tumpang tindih.

Kepala BPS menyampaikan bahwa DTSEN dapat digunakan langsung dengan tetap melaksanakan verifikasi dan validasi data karena data sosial ekonomi kependudukan sangat dinamis, seperti kematian dan tingkat kesejahteraan.



Gambar 1. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dengan pembahasan tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

2. Rapat terbatas Anggota pengarah dan pelaksana TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) Pusat

Rapat dilaksanakan pada 4 Maret 2025 secara daring, bertujuan untuk: (1) Membahas dampak efisiensi anggaran terhadap program penurunan stunting; dan (2) Membahas rencana pengukuran kinerja penurunan stunting tahun 2025 (SSGI).

Rapat dibuka oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden (Dadan Wildan) dan dihadiri oleh Sekretaris Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Budi Setiyono), Deputi Bidang Advokasi pergerakan dan Informasi BKKBN (Teguh), Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK (Sukadiono), Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes (Endang Sumiwi), Badan Pangan Nasional, dan Kementerian/Lembaga anggota TPPS.

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden menyampaikan beberapa hal:



- Peran Setwapres dalam percepatan pencegahan dan penurunan stunting (P3S) adalah (1) Mendukung Wapres selaku Ketua pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), dan (2) Wakil Ketua pelaksana Bidang Advokasi dan Komitmen Kepemimpinan TPPS.
- Percepatan penurunan stunting menjadi prioritas dalam RPJMN 2025-2029 dengan target menurunkan prevalensi stunting menjadi 14,2% pada tahun 2029 dan menjadi 5% pada tahun 2045.
- Tantangan Pelaksanaan Program P3S Tahun 2025 adalah (1) Efisiensi anggaran, (2) Kepala Daerah baru, (3) Revisi Perpres 72/2021 tentang TPPS, (4) Integrasi MBG untuk P3S, dan (5) Pengukuran kinerja penurunan stunting 2025.

Selanjutnya Perwakilan dan K/L anggota TPPPS menyampaikan dampak efisiensi anggaran atas program/kegiatan P3S masing-masing K/L. Efisiensi anggaran TA 2025 telah berdampak pada:

- Kemenduk/BKKBN tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan program dan kegiatan mendukung percepatan penurunan stunting di Pusat. Tergantung pada optimalisasi DAK pada kabupaten/kota untuk kegiatan intervensi sensitif.
- Kemenkes terbatas untuk anggaran survei, yaitu Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) padahal datanya lebih akurat dibandingkan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM). SSGI 2024 telah dilaksanakan dan menunggu finalisasi oleh BPS. Apabila tidak ada relaksasi anggaran untuk survei, maka hanya ada satu alternatif data pengukuran kinerja, yaitu EPPGBM. Hasil pengukuran akan sangat tergantung intervensi spesifik yang dilakukan pemerintah daerah melalui operasional posyandu, sehingga perlu dukungan dari APBD serta Kemendagri dan Kemendes.
- Bapanas mengalami penurunan target lokasi Pengembangan Rumah B2SA dari 101 lokasi desa dengan KRS di wilayah rentan rawan pangan menjadi hanya 47 lokasi. Namun terdapat kegiatan baru mendukung P3S, yaitu Bantuan pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi.
- Kementan mengalami penurunan target lokasi budidaya bahan pangan biofortifikasi dan pekarangan pangan bergizi.



- Kemenag mengalami penghapusan anggaran Bimbingan Perkawinan (Bimwin) untuk calon pengantin agama kristen, protestan, hindu, dan Budha, sehingga tergantung penyuluhan pemuka agama.
- Kemendikdasmen mengalami ketiadaan alokasi anggaran untuk Bimtek Guru PAUD.

Efisiensi anggaran TA 2025 tidak berdampak pada:

- Kemensos untuk bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH),
- Kemendes untuk operasional Posyandu yang berasal dari Dana Desa.
- BGN untuk kegiatan makan bergizi gratis (MBG), dan Kemen PUPR untuk pengadaan air bersih dan sanitasi.

Kemendagri tidak ada alokasi anggaran khusus untuk intervensi stunting, namun Kemendagri dalam rangka mengawal P3S melalui fungsi koordinasi dikeluarkan Surat Edaran (SE) Mendagri bagi Pemerintah Daerah untuk tidak melakukan efisiensi APBD atas kegiatan P3S di daerah.

Tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu DJA Kemenkeu akan menyampaikan data inventarisasi awal terkait program/kegiatan dan anggaran yang mendukung P3S terdampak efisiensi TA 2025.

3. Koordinasi dengan JICA terkait penjajakan peluang kolaborasi kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan

Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2025, bertujuan untuk: (1) Konsultasi tatakelola pengendalian kerawanan pangan pascabencana alam; dan (2) Penjajakan peluang kerjasama dengan JICA dalam hal pengendalian kerawanan pangan

Pertemuan dihadiri oleh Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan, Atase Petanian Kedutaan Besar Jepang di Indonesia (Motoaki Komiya), JICA Expert – Policy Advisor to Bureau of Planning (Koide Jun), Project Formulation Advisor JICA (Jitsukata Hrioaki).

Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan menyampaikan terkait: (1) situasi ketahanan pangan nasional, (2) risiko kebencanaan di Indonesia yang dapat memicu potensi kejadian kerawanan pangan, (3) program dan kegiatan pencegahan, mitigasi dan penanganan kerawanan pangan(4) Amanat



pengendalian kerawanan pangan dalam RPJMN 2025-2029 yang dilaksanakan D21, termasuk Bantuan Pangan Fortifikasi.

Tim JICA menjelaskan bahwa secara nasional di Jepang tidak terjadi kerawanan pangan secara wilayah maupun individu (under nourishment) karena seluruh wilayah Jepang terhubung dengan sarana transportasi yang baik dan fasilitas logistik yang lengkap. Hal ini mendukung penanganan masalah kebencanaan untuk distribusi bantuan maupun logistik pemulihan area terdampak, termasuk pangan.

Pemerintah Jepang tidak menyelenggarakan fortifikasi pangan karena pendidikan pola pangan bernutrisi untuk kebutuhan tumbuh kembang dan hidup sehat dimulai sejak usia dini dari tingkat rumah tangga dan dunia pendidikan. Oleh karena itu tidak ada prevalensi balita stunting, wasting & underweight.

Penganganan pascabencana di Jepang dilakukan dalam dua tahap, yaitu penanganan infrastruktur fisik termasuk transportasi, lalu penanganan kebutuhan dasar, yaitu pangan yang disediakan melalui pembelian produk pangan ready to eat hasil produksi pihak swasta yang berlokasi di sekitar lokasi terdampak, dengan produk dan bahannya sesuai program nutrisi pemerintah serta berbahan baku setempat.

Tim JICA mempertimbangkan untuk berdiskusi lebih rinci atas technical assistance untuk peningkatan kapasitas dalam pengendalian kerawanan pangan pasca bencana.

Tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu Dit 21 akan melakukan pembahasan lebih lanjut terkait peluang kerjasama dengan JICA terutama dalam hal post disaster management dalam ketahanan pangan.



Gambar 2. Koordinasi dengan JICA terkait peninjauan peluang kolaborasi kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan



3.1.2. Kegiatan Direktorat Kewaspadaan Pangan

Direktorat Kewaspadaan Pangan melaksanakan 6 output yaitu: 1) Koordinasi Mendukung Penyelamatan Pangan; 2) RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP); 3) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan; 4) Data dan Informasi Penyelamatan Pangan; 5) Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan 6) Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan. Alokasi anggaran pusat yaitu sebesar Rp. 3,478,188,000,-.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan bulan Maret 2025:

1. Koordinasi Mendukung Penyelamatan Pangan.

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) melalui Direktorat Kewaspadaan Pangan sejak tahun 2022 gencar melakukan aksi Penyelamatan Pangan untuk mencegah dan mengurangi Food Loss and Waste (FLW) atau yang biasa dikenal dengan Susut dan Sisa Pangan (SSP). Praktik-praktik baik pada pelaksanaan aksi Penyelamatan Pangan di Indonesia disampaikan oleh Nita Yulianis, Direktur Kewaspadaan Pangan pada Series Webinar Food Loss and Waste yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Denmark di Hanoi, Vietnam bekerja sama dengan Danish Veterinary and Food Administration, Denmark.

Direktur Kewaspadaan Pangan NFA, Nita Yulianis menyampaikan bentuk kebijakan dan aksi Penyelamatan Pangan yang telah dilakukan Indonesia sejak tahun 2022 hingga 2024 dan berlanjut pada tahun 2025 guna mencegah Susut dan Sisa Pangan (SSP). Hal ini disampaikan pada Series Webinar Food Loss and Waste dengan topik Public Private Partnership on Promoting Food Loss and Food Waste, Vietnam, Rabu (5/3/2025).

“Aksi Penyelamatan Pangan di Indonesia yang kita sebut Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) telah diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional sejak tahun 2022 dengan piloting project areas mencakup wilayah Jabodetabek. Tahun 2023 pelaksanaan kegiatan GSP di 12 Provinsi dan bertambah menjadi 15 Provinsi pada tahun 2024 dan pada Tahun 2025 bertambah menjadi 17 Provinsi pelaksana serta terdapat kebijakan kepala daerah yang turut mendukung baik di tingkat provinsi dan kab/kota.” Ujar Nita Yulianis.



Selain itu, juga disampaikan praktik baik aksi penyelamatan pangan kolaborasi pentahelix meliputi Pemerintah Daerah, Akademisi, Sektor Swasta, dan Bank Pangan/Penggiat Penyelamatan Pangan. “Kami memiliki banyak bentuk kolaborasi dalam aksi penyelamatan pangan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah” tambah Nita Yulianis.

Ms Sanne, Sector Consellor Denmark Embassy in Vietnam sebagai host acara menyampaikan bahwa Indonesia dipilih sebagai salah satu narasumber pada webinar ini karena pemerintah Indonesia melalui NFA telah memiliki aksi penyelamatan pangan dengan melibatkan kolaborasi pentahelix sebagai bentuk public private partnership. DVFA Denmark juga merujuk bahwa modul teknis penyelamatan pangan terbitan Badan Pangan Nasional dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Vietnam dalam aksi mencegah dan mengurangi sisa pangan.

Head of Programe GAIN Indonesia, Widya Sutiyo menyampaikan bahwa Badan Pangan Nasional memiliki peran yang krusial sebagai kolaborator cross-sectoral dan multi-stakeholder untuk mengimplementasikan penurunan FLW sebesar 75% di tahun 2025 sesuai dengan roadmap pengelolaan susut dan sisa pangan dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045.

Webinar ini merupakan salah satu program Phase III dari Strategic Sector Cooperation (SSC) on Food Safety antara Vietnam dan Denmark dengan tujuan untuk mencapai transformasi sistem pangan. Hal ini juga iniline dengan SSC on Food Loss and Waste kerjasama Denmark dengan Pemerintah RI.

Pada webinar ini juga turut hadir sebagai narasumber yaitu Deputy Head of Science and International Cooperation Division, Institute of Agricultural Engineering and Post-Harvest Technology Vietnam; One Third Secretariat, Ministry of Food, Agriculture and Fisheries of Denmark; HØRKRAM Company; dan Salling Group dengan jumlah peserta webinar sebanyak 45 peserta dari berbagai instansi di Vietnam, Indonesia dan Denmark.



Gambar 3. Berbagi Praktik Baik dengan Vietnam via zoom, tentang NFA Sebarkan Aksi Penyelamatan Pangan di Indonesia

2. Pelajari Praktik Baik Pengelolaan Sampah di Jepang, Badan Pangan Nasional Perkuat Upaya Penanganan Susut dan Sisa Pangan.

TOKYO - Pemerintah Indonesia terus melakukan langkah proaktif dalam menghadapi tantangan pengelolaan susut dan sisa pangan dengan mengambil inspirasi dari praktik baik di Jepang dalam pengelolaan sampah termasuk susut dan sisa pangan. Hal ini menjadi isu utama yang diangkat dalam Waste Management Study Program in Japan yang diselenggarakan pada tanggal 9-13 Maret 2025 di Tokyo, Jepang.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat upaya Indonesia dalam penanganan susut dan sisa pangan, sejalan dengan komitmen Badan Pangan Nasional dalam meningkatkan efisiensi penanganan limbah pangan.

“Delegasi Indonesia mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai kebijakan, regulasi dan aksi sebagai wujud komitmen Pemerintah Jepang dalam menangani isu lingkungan dan masalah sampah, serta upaya pengurangan SSP,” ungkap Direktur Kewaspadaan Pangan NFA Nita Yulianis sebagai salah satu Delegasi RI yang hadir dalam kesempatan tersebut.

Menurutnya program ini bersifat high level official untuk pendalaman dan pertukaran pengembangan kebijakan pengelolaan sampah termasuk susut dan



sisia pangan melalui pendekatan ekonomi sirkular, Waste to Energy (WtE) serta carbon credits.

“Pemerintah Jepang memiliki komitmen untuk pengaturan sampah dan kebersihan lingkungan selama kurun waktu 1900-2025 dan memiliki Act on Promotion of Food Loss and Waste Reduction. Undang Undang ini mengatur tentang national movement untuk pengurangan Susut dan Sisa Pangan (SSP) dan peran serta para pihak mencakup pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan komunitas,” jelasnya.

Nita mengungkapkan bahwa Jepang memiliki dua prinsip utama untuk penurunan SSP yakni perubahan perilaku dan tumbuhnya kesadaran atas pentingnya SSP dan mencegah terbuangnya edible food.

“Dua Prinsip yang dimiliki Jepang ini selaras dengan twintrack approach yang dimiliki Indonesia dalam menggencarkan Gerakan Selamatkan Pangan yakni penetapan kebijakan dan sosialisasi promosi untuk perubahan perilaku dan aksi serta fasilitasi penyelamatan pangan,” tegasnya.

Nita menyebut jika pemerintah daerah memiliki peranan vital dan mendasar dalam penanganan masalah sampah dan lingkungan sebagaimana terefleksi dari pengaturan Undang-Undang oleh Pemerintah Jepang maupun Indonesia.

“Untuk itu capacity building dan sinergi kolaborasi strategis saling melengkapi dalam menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk tantangan penanganan susut dan sisa pangan di Indonesia,” tambah Nita.

Rangkaian kegiatan salah satunya mengunjungi Kuradashi yakni toko dan platform yang mengelola penjualan makanan berlebih di Jepang dengan motto Social Good Market. “Konsumen diajak terlibat dalam upaya penyelamatan pangan yang kinerja aktivitasnya dapat dipantau di laman aplikasi masing-masing member. Di Indonesia terdapat aplikasi serupa yakni SURPLUS,” ucap Nita.

Dalam kesempatan terpisah Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan jika praktik baik Jepang dengan sistem pengelolaan sampah yang efisien ini dapat diterapkan di Indonesia sebagai solusi yang efektif dan berkelanjutan, demi tercapainya masyarakat yang lebih sadar akan pengelolaan limbah dan pangan yang berkelanjutan.



“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menjalin kemitraan lebih lanjut antara Indonesia dan Jepang dalam upaya mencapai target pengurangan limbah nasional,” tegasnya.

Mewakili Pemerintah RI dalam kegiatan tersebut, Delegasi RI yang hadir terdiri dari Deputy Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti, Asdep Ekonomi Sirkular Kemenko Pangan Rofi Alhanif, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas Priyanto Rohmatullah.



Gambar 4. Badan Pangan Nasional mewakili Pemerintah RI dalam Praktik Baik Pengelolaan Sampah di Jepang, sekaligus memperkuat upaya penanganan susut dan sisa pangan.

3. Pastikan Ketersediaan Pangan Aman Jelang Idulfitri, NFA Imbau Masyarakat Belanja Bijak Sesuai Kebutuhan

JAKARTA - Ramadan telah memasuki pekan keempat dan menjelang Lebaran, Pemerintah terus melakukan sejumlah langkah aksi stabilisasi pasokan dan harga pangan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan laju inflasi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Nita Yulianis pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Inflasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri, Senin (24/3/2025).

“Bersama pemerintah daerah, kami terus mendorong pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menjadi salah satu andalan pemerintah sebagai



stabilisator pangan pokok semakin digencarkan di tingkat daerah. Hingga saat ini (21 Maret 2025) telah terlaksana sebanyak 2.384 kali kegiatan di 31 Provinsi dan 224 Kab/Kota menggunakan APBN, APBD, maupun secara mandiri” ujar Nita.

Sementara itu sebagai upaya menghadirkan pangan pokok agar lebih dekat ke masyarakat, pemerintah juga telah meluncurkan Operasi Pasar Pangan Murah yang dipusatkan melalui jaringan Kantor PT Pos Indonesia se-Indonesia.

“Operasi Pasar Pangan Murah ini berkolaborasi dengan lintas K/L, BUMN Pangan, dan pelaku usaha pangan, telah terlaksana di 3.158 titik dari target total 6.845 titik. Periode pelaksanaan OP Pangan Murah pada 24 Februari-29 Maret 2025” tutur Nita.

Strategi aksi lainnya dilaksanakan dengan memaksimalkan kerja sama antar daerah dalam bentuk program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dan memperbanyak penyebaran Kios Pangan sebagai alternatif masyarakat dalam mengakses pangan pokok strategis yang berkualitas dengan harga terjangkau juga terus digalakkan bersama pemerintah daerah.

“Hingga saat ini, terdapat 484 kios pangan di 32 provinsi dan 108 kabupaten/kota yang menyediakan bahan pangan pokok setiap hari dengan harga terjangkau,” kata Nita.

Menutup paparannya, Nita Yulianis mengungkapkan bahwa ketersediaan komoditas pangan pokok strategis secara umum mencukupi dan mengimbau agar masyarakat berbelanja bijak sesuai kebutuhan, tidak perlu panic buying. Pada saat yang sama, Nita juga mengingatkan agar semua pihak melakukan upaya stop boros pangan.

"Ramadan menjadi momentum yang pas untuk mengubah kebiasaan kita dari yang kerap menyisakan makanan, menjadi lebih menghargai makanan dengan menghabiskannya. Selain itu, langkah stop boros pangan bisa dimulai dari cara berbelanja yang bijak, yaitu berbelanja sesuai kebutuhan saja," terang Nita.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa GPM dan operasi pasar ini akan terus dijalankan hingga menjelang lebaran, sehingga masyarakat bisa beribadah lebih tenang, dan lebih khusyuk,

“Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, ini untuk masyarakat luas ya, pemerintah hadir untuk menyediakan bahan pangan yang terjangkau. Adapun



terkait ketersediaan pangan, itu cukup dan aman. Sudah kita hitung semua. Tinggal kita pastikan distribusinya merata dan sampai ke semua titik," ujar Arief. "Jadi Ramadan tenang dan menyenangkan seperti arahan Bapak Presiden dapat terwujud. Tenangnya seperti apa, bahwa harga-harga akan terjangkau dan tersedia bagi masyarakat," lanjut Arief

Pada kesempatan tersebut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyebutkan untuk komoditas beras dan jagung karena pada saat ini sedang berada pada puncak panen sehingga ketersediaannya mencukupi.

"Beras dan jagung yang saat ini sedang dalam masa panen, diharapkan entitas milik negara lain seperti BUMN maupun BUMD dapat juga menyerap sebagai stok sekaligus menjaga nilai tukar petani, namun sejumlah komoditas lainnya perlu diwaspadai seperti bawang merah dan cabai rawit merah" ujar Tito.

"Saya berharap Badan Pangan Nasional dapat membantu distribusi cabai dari wilayah produsen ke wilayah konsumen dengan harga tinggi menggunakan Fasilitas Distribusi Pangan" pinta Tito..



Gambar 5. Pastikan Ketersediaan Pangan Aman Jelang Idulfitri, NFA Imbau Masyarakat Belanja Bijak Sesuai Kebutuhan



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan Deputi Bidang Kerawanan Pangan bulan Januari 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat 1(satu) kegiatan terdiri dari 5 KRO dan 6 output/RO berdasarkan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.536.538.000 untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.
2. Realisasi keuangan dan fisik pada bulan Maret Tahun 2025 untuk Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan tercatat sebesar Rp. 63.652.360,- atau 0,86%, sementara untuk Direktorat Kewaspadaan Pangan mencapai Rp.153.533.680,- atau 2,16%. Jika dibandingkan dengan target bulan Maret Tahun 2025 sebesar Rp. 545.120.175,-, maka total persentase realisasi mencapai **39,84%**.

4.2. Permasalahan

Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Kewaspadaan Pangan selama Bulan Maret 2025 berjalan dengan baik.

4.3. Langkah Perbaikan (Rekomendasi)

Perlu menyusun rencana kegiatan dan rencana penyerapan anggaran untuk mempercepat realisasi keuangan dan fisik pada bulan berikutnya.